

**KELEMBAGAAN PENGELOLA DESA WISATA LIMBASARI,
KECAMATAN BOBOTSARI, KABUPATEN PURBALINGGA**

Mayang Dwi Anjani, Retno Sunu Astuti, Kismartini

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: <http://www/fisip.undip.ac.id>
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

Limbasari Tourism Village has diverse tourism potential, including nature, culture, religion, and education tourism. However, the management of this tourism village still faces several obstacles such as lack of supporting infrastructure, limited promotion, low community involvement, and lack of coordination between stakeholders. Tourism management institutions, such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), play an important role in increasing the effectiveness of tourism village management. This study aims to analyze the institutional aspects of the management of Limbasari Tourism Village in Purbalingga Regency using Scott's institutional theory (2001), which consists of three main pillars: regulative, normative, and cognitive. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including the Tourism Office, Pokdarwis, BUMDes (village-owned enterprise), and local community members. The findings indicate that, on the regulative pillar, village tourism management is supported by formal legal instruments such as regional regulations and a tourism master plan, although there are still challenges in local-level implementation and understanding of the regulations. The normative pillar reveals relatively high community participation, although it remains informal and uneven. In the cognitive pillar, both community members and managers have a positive perception of the benefits of tourism, yet differences in understanding and alignment among stakeholders still exist. This research also identifies several institutional barriers, including limited human resources, inadequate infrastructure, internal conflicts, weak inter-institutional synergy, and high dependency on government support. While efforts toward digitalization and sustainability have begun, they have not yet been systematically integrated into the institutional framework. Therefore, strengthening institutional capacity, optimizing the use of technology, and implementing well-structured sustainability strategies are essential to support the independence of the tourism village.

Keywords: *institution, tourism village, Limbasari Village, Scott's theory,*

regulative, normative, cognitive, digitalization, sustainability

ABSTRAK

Desa Wisata Limbasari memiliki potensi wisata yang beragam, termasuk wisata alam, budaya, religi, dan pendidikan. Namun, pengelolaan desa wisata ini masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya infrastruktur pendukung, keterbatasan promosi, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Kelembagaan pengelola wisata, seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan desa wisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari di Kabupaten Purbalingga berdasarkan perspektif teori kelembagaan Scott (2001), yang mencakup tiga pilar utama: regulatif, normatif, dan kognitif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, yaitu Dinporapar Kabupaten Purbalingga, pengurus Pokdarwis, pengelola BUMDes, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulatif, pengelolaan desa wisata telah memiliki dasar hukum berupa peraturan daerah dan rencana induk pariwisata, namun masih terdapat kendala dalam penerapan dan pemahaman regulasi di tingkat lokal. Secara normatif, partisipasi masyarakat tergolong aktif, meskipun belum sepenuhnya merata atau terstruktur. Sementara itu, secara kognitif, masyarakat dan pengelola memiliki persepsi positif terhadap manfaat desa wisata, namun masih ditemukan perbedaan pandangan dan ketimpangan pemahaman antar aktor. Penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor penghambat kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, konflik internal, lemahnya sinergi antar lembaga, serta ketergantungan terhadap pemerintah. Upaya digitalisasi dan keberlanjutan telah mulai dilakukan, namun belum terintegrasi secara sistematis dalam struktur kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, dan strategi keberlanjutan yang lebih terarah untuk mendukung kemandirian desa wisata.

Kata kunci: kelembagaan, desa wisata, Desa Limbasari, teori Scott, regulatif, normatif, kognitif, digitalisasi, keberlanjutan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Sektor ini tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya dan lingkungan jika dikelola secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pengembangan desa wisata menjadi strategi utama pemerintah dalam mendekatkan pembangunan ke

tingkat lokal dengan memanfaatkan potensi sosial, budaya, dan alam yang dimiliki oleh desa. Konsep desa wisata mengusung prinsip *community-based tourism* (CBT), yakni pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pendekatan ini dinilai lebih inklusif dan berkelanjutan karena mendorong kemandirian ekonomi dan partisipasi masyarakat desa.

Kabupaten Purbalingga merupakan salah

satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama berbasis desa. Pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah desa sebagai desa wisata, salah satunya adalah Desa Wisata Limbasari yang terletak di Kecamatan Bobotsari. Desa ini memiliki beragam potensi wisata, termasuk wisata alam (air terjun, bukit, sungai), budaya (batik tradisional, situs sejarah), religi (petilasan dan legenda lokal), hingga wisata pendidikan (pertanian). Sejak ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2013, Desa Limbasari dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Patrawisa dan didukung BUMDes Maju Makmur. Namun meskipun sudah berjalan selama satu dekade, pengembangan Desa Wisata Limbasari belum menunjukkan hasil yang optimal bila dibandingkan dengan desa wisata lain di Kabupaten Purbalingga, seperti Desa Wisata Serang.

Berbagai tantangan masih dihadapi dalam pengelolaan Desa Wisata Limbasari. Secara regulatif, memang telah tersedia kerangka hukum dan perencanaan strategis yang mendukung, namun implementasi di tingkat lokal masih lemah. Dari sisi normatif, keterlibatan masyarakat

belum merata dan cenderung bersifat sporadis. Sementara secara kognitif, kesadaran kolektif dan pemahaman terhadap pentingnya pengelolaan desa wisata yang profesional dan kolaboratif masih rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara potensi yang dimiliki dan output yang dihasilkan dalam bentuk kunjungan wisatawan maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam kerangka teori kelembagaan, W. Richard Scott (2001) menjelaskan bahwa institusi atau kelembagaan terdiri dari tiga pilar utama: pilar regulatif, pilar normatif, pilar kognitif. Ketiga pilar ini saling melengkapi dalam membentuk struktur sosial yang stabil dan bermakna. Pilar regulatif mencerminkan aspek formal berupa aturan dan kebijakan. Pilar normatif berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku. Sedangkan pilar kognitif menggambarkan cara pandang dan kepercayaan kolektif yang mengarahkan tindakan sosial. Ketika ketiga pilar ini berjalan harmonis, maka institusi akan memiliki legitimasi dan kapasitas yang kuat dalam mencapai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan Scott. penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kelembagaan dalam

pengelolaan desa wisata yang menyebabkan belum optimalnya pengelolaan desa wisata, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola pariwisata desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian kelembagaan dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan.

Dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis **“Bagaimana kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari, Kabupaten Purbalingga”** guna memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan daya saing desa wisata ini di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Dilaksanakan di Desa Limbasari Kabupaten Purbalingga dengan subjek penelitian melalui teknik *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan data kualitatif dari bentuk kata-kata, gambar, dan tulisan. Sumber data didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh

dari wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari catatan-catatan, buku, literatur, koran, dokumen, laporan, artikel, dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dan interpretasi data melalui reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data. Kemudian, untuk kualitas data mempergunakan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga

Dalam hal ini, peneliti menjabarkan penelitian dengan metode wawancara. Penelitian ini akan membahas pilar-pilar dalam kelembagaan pengelola desa wisata di Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga.

1. Pilar Regulatif (*Regulative Pilar*)

Pilar regulatif dalam teori kelembagaan Scott (2001) menekankan pentingnya aturan, regulasi, dan penegakan hukum sebagai kerangka normatif yang membentuk perilaku aktor dalam suatu lembaga. Dalam konteks Desa Wisata Limbasari, aspek regulatif tercermin dari adanya kebijakan daerah, peraturan desa, serta bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelola desa

wisata.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa pengelolaan desa wisata telah memiliki payung hukum yang jelas, antara lain melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Desa Wisata serta Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Regulasi ini menjadi dasar dalam menyusun program pembinaan, pengawasan, dan pengembangan desa wisata secara menyeluruh.

Sosialisasi regulasi kepada pengelola desa wisata dilakukan melalui Forum Komunikasi Desa Wisata (FKDeswita) dan berbagai pertemuan lintas kelembagaan. Pemerintah daerah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi minimal tiga kali dalam setahun, guna memastikan pelaksanaan regulasi berjalan sesuai tujuan dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan pembinaan juga diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan teknis kepada pengelola desa wisata.

Namun, dari wawancara dengan pengurus Pokdarwis Patrawisa, ditemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan aturan di

lapangan. Misalnya, dalam hal penegakan disiplin kebersihan dan pengelolaan sampah, masih ada masyarakat atau wisatawan yang kurang taat terhadap aturan, sehingga berdampak pada kenyamanan dan kelestarian lingkungan wisata.

Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengetahui keberadaan aturan tentang desa wisata, namun pemahaman terhadap isi dan implementasinya masih terbatas. Beberapa informan menyampaikan bahwa pengelolaan desa wisata sempat mengalami stagnasi pasca pandemi, yang membuat penerapan regulasi menjadi kurang optimal selama periode tersebut.

Sementara itu, BUMDes Maju Makmur Limbasari menyampaikan bahwa mereka belum memiliki dasar hukum spesifik untuk unit usaha wisata yang mereka kelola. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab antara BUMDes dan Pokdarwis, terutama dalam aspek legalitas dan koordinasi program kerja.

Dengan demikian, aspek regulatif dalam kelembagaan Desa Wisata Limbasari sudah mulai terbangun melalui kebijakan daerah dan dukungan pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya penguatan legalitas di tingkat desa, peningkatan pemahaman pelaku wisata terhadap regulasi, serta sinergi antar

lembaga agar pengelolaan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Pilar Normatif

Pilar normatif dalam teori kelembagaan Scott (2001) menitikberatkan pada nilai-nilai, norma sosial, dan kewajiban moral yang dianut oleh anggota suatu organisasi atau masyarakat. Pilar ini berfungsi sebagai pedoman kolektif yang menentukan perilaku yang dianggap pantas dan dapat diterima dalam suatu komunitas.

Dalam konteks Desa Wisata Limbasari, pilar normatif terlihat kuat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan desa wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Pokdarwis, masyarakat setempat memiliki keterlibatan yang cukup tinggi, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun promosi wisata.

Selain itu, masyarakat juga ikut serta sebagai pengelola, penyedia jasa, serta membantu menyebarkan informasi desa wisata ke luar desa. Bentuk kontribusi ini tidak hanya mencerminkan dukungan moral, tetapi juga keterlibatan aktif sebagai bagian dari kelembagaan itu sendiri.

Dari sisi norma sosial, kegiatan wisata di Desa Limbasari sebagian besar sejalan dengan budaya lokal. Hal ini terlihat dari kenyamanan masyarakat terhadap kehadiran wisatawan, serta tidak adanya konflik antara kegiatan wisata dan adat istiadat setempat. Informasi dari masyarakat menunjukkan bahwa mereka "sangat mendukung" keberadaan desa wisata, karena dianggap membawa manfaat ekonomi dan memperkuat identitas lokal.

Standar pelayanan dan etika juga mulai dibangun melalui pembiasaan dan penyadaran yang dilakukan oleh Pokdarwis dan BUMDes. Misalnya, Pokdarwis menanamkan prinsip pelayanan yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan wisatawan, serta menjaga sikap ramah terhadap pengunjung. Meski belum seluruhnya memiliki standar tertulis atau SOP formal, praktik etika pelayanan telah dijalankan secara kolektif dan konsisten.

Namun demikian, terdapat tantangan dalam menjaga kesinambungan partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara, beberapa pengurus Pokdarwis menyebutkan bahwa kesadaran individu untuk terlibat aktif masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kesediaan menjadi relawan atau mengikuti pelatihan. Selain itu, kontribusi masyarakat masih bersifat informal dan tergantung pada momen atau kebutuhan tertentu, belum

sepenuhnya terstruktur sebagai bagian dari kelembagaan formal.

Secara keseluruhan, pilar normatif kelembagaan Desa Wisata Limbasari telah menunjukkan fondasi yang kuat melalui partisipasi dan nilai sosial yang mendukung. Penguatan lebih lanjut dapat dilakukan dengan menyusun standar operasional yang lebih sistematis dan memperluas ruang partisipasi agar seluruh elemen masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan desa wisata.

3. Pilar Kognitif

Pilar kognitif dalam teori kelembagaan Scott (2001) merujuk pada kerangka berpikir, persepsi, keyakinan, dan pemahaman bersama yang membentuk makna dan identitas kelembagaan. Pilar ini berperan dalam menciptakan rasa memiliki dan legitimasi terhadap sistem atau struktur kelembagaan tertentu, termasuk dalam pengelolaan desa wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan pengelola terhadap kelembagaan Desa Wisata Limbasari pada umumnya positif. Sebagian besar informan meyakini bahwa keberadaan desa wisata memberikan manfaat nyata,

baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Warga merasa dilibatkan dan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis dan BUMDes, meskipun sebagian masih belum sepenuhnya memahami struktur dan peran kelembagaan secara formal.

Dari sisi pengurus Pokdarwis, kesadaran akan pentingnya kelembagaan telah terbentuk melalui pengalaman langsung dalam mengelola kegiatan wisata. Mereka memahami bahwa struktur yang jelas, koordinasi antar aktor, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Edukasi kepada masyarakat juga telah dilakukan melalui sosialisasi langsung, untuk membangun pemahaman bersama mengenai manfaat desa wisata.

Namun, tantangan masih ditemukan dalam hal keyakinan masyarakat terhadap lembaga tertentu, khususnya BUMDes. Beberapa informan menyampaikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya yakin terhadap kapasitas BUMDes dalam mengelola unit wisata. Hal ini berdampak pada rendahnya inisiatif kolektif untuk mendukung program BUMDes, dibandingkan dengan Pokdarwis yang lebih dahulu terbentuk dan lebih dikenal masyarakat.

Selain itu, budaya lokal turut memengaruhi pola pikir masyarakat

terhadap pengelolaan desa wisata. Nilai-nilai gotong royong, rasa kebersamaan, dan kecintaan terhadap desa menjadi faktor pendukung dalam menggerakkan partisipasi. Meskipun tidak banyak tradisi yang secara eksplisit mendukung kegiatan wisata, semangat warga untuk menjaga dan mempromosikan lingkungan wisata menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai kolektif yang mendasari keberlanjutan kelembagaan.

Tantangan lainnya terletak pada perbedaan persepsi dan pemahaman antar aktor, yang dapat memicu kesenjangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Misalnya, ada perbedaan persepsi antara pengelola wisata dan masyarakat terkait peran masing-masing, atau harapan terhadap dukungan pemerintah. Dalam hal ini, membangun komunikasi yang terbuka dan edukatif menjadi kunci untuk menyatukan visi dan meningkatkan kesadaran kolektif.

Secara keseluruhan, pilar kognitif kelembagaan Desa Wisata Limbasari telah menunjukkan perkembangan yang positif, dengan adanya pemahaman yang mulai terbentuk di berbagai elemen masyarakat. Meski demikian, penguatan kapasitas kelembagaan masih diperlukan melalui

peningkatan literasi kelembagaan, pemanfaatan budaya lokal sebagai identitas wisata, serta penciptaan ruang dialog antar pengelola Desa Wisata Limbasari.

Faktor Penghambat Kelembagaan dalam Pengelolaan Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga

1. Keterbatasan SDM

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan SDM yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Wawancara dengan Pokdarwis mengungkapkan bahwa meskipun sebagian anggota memiliki kemampuan dasar, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kapasitas secara menyeluruh, khususnya dalam hal manajemen pariwisata, pelayanan wisatawan, dan promosi digital. Pelatihan belum dilakukan secara rutin, dan sebagian besar bergantung pada inisiatif pemerintah atau pihak luar.

BUMDes juga menghadapi tantangan serupa. Meskipun telah melakukan studi banding, belum tersedia pelatihan formal yang sistematis bagi pengelola unit usaha wisata. Hal ini menghambat pengembangan inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan wisata desa.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas fisik seperti area parkir, toilet

umum, dan pendukung wahana wisata (seperti tubing) masih dianggap belum memadai. Keterbatasan infrastruktur ini tidak hanya memengaruhi kenyamanan pengunjung, tetapi juga menciptakan kesan kurang siap dalam menyambut wisatawan secara profesional. BUMDes sendiri menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur masih terkendala dana, sehingga pembangunan bersifat bertahap dan tergantung pada anggaran yang tersedia.

3. Konflik Internal dan Kepentingan

Meski tidak dominan, beberapa narasumber mengakui pernah terjadi konflik internal, khususnya pada wilayah-wilayah tertentu seperti Patrawisa. Misalnya, tumpang tindih kepentingan antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan area wisata menciptakan friksi dalam pelaksanaan program. Pokdarwis menyebut bahwa konflik biasanya diselesaikan melalui diskusi internal, namun tetap menunjukkan perlunya mekanisme resolusi konflik yang lebih terstruktur dan partisipatif.

4. Lemahnya Sinergi Kelembagaan

Koordinasi antar lembaga seperti Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah

desa masih belum optimal. Meskipun ada niat untuk bekerja sama, belum tersedia mekanisme atau forum rutin yang mampu menyatukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara sinergis. Sebagian narasumber bahkan menyebutkan belum adanya kerja sama konkret antara BUMDes dan pihak luar. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas kelembagaan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan desa wisata.

5. Ketergantungan pada Pemerintah

Faktor penghambat lainnya adalah tingginya ketergantungan terhadap pemerintah, baik dalam hal pendanaan, pelatihan, maupun program pembangunan. Meskipun pemerintah daerah secara aktif mendorong kemandirian desa wisata, implementasi di lapangan masih menunjukkan bahwa inisiatif dari masyarakat atau lembaga lokal belum cukup kuat untuk berjalan secara mandiri. Sebagian masyarakat bahkan menyatakan bahwa desa wisata "tidak bisa berjalan tanpa bantuan pemerintah."

Dengan demikian, penguatan kelembagaan Desa Wisata Limbasari tidak hanya memerlukan intervensi dari luar, tetapi juga kesadaran internal untuk membangun kapasitas, memperkuat sinergi, dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap pengelolaan pariwisata desa. Mengatasi hambatan-

hambatan ini menjadi langkah penting menuju pengelolaan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kelembagaan pengelola Desa Wisata Limbasari dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan Scott (2001), dapat disimpulkan hal-hal berikut, yaitu dalam pilar regulatif pengelolaan Desa Wisata Limbasari telah memiliki dasar hukum melalui Perda No. 1 Tahun 2024 dan dokumen perencanaan pariwisata daerah. Pemerintah daerah aktif melakukan pembinaan dan monitoring, namun penerapan regulasi di tingkat lokal masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman dan kepatuhan penuh dari masyarakat dan pengelola. Dalam pilar normatif, nilai sosial seperti gotong royong dan partisipasi masyarakat terlihat cukup kuat dalam pengelolaan desa wisata. Masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan promosi dan operasional wisata. Namun, kesadaran dan kontribusi aktif sebagian masyarakat masih bergantung pada momen tertentu dan belum sepenuhnya terstruktur. Lalu dalam pilar kognitif, terdapat pemahaman kolektif mengenai manfaat desa wisata, baik

dari sisi ekonomi maupun sosial. Namun, persepsi terhadap kelembagaan seperti BUMDes masih belum sepenuhnya positif. Tantangan juga muncul dari kurangnya keselarasan visi antar aktor dan perbedaan pemahaman peran masing-masing lembaga.

Adapun beberapa hambatan utama kelembagaan meliputi keterbatasan SDM, fasilitas fisik yang belum optimal, konflik internal (terutama di area tertentu seperti Patrawisa), serta lemahnya sinergi antara Pokdarwis, BUMDes, dan pemerintah desa. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah masih menjadi kendala utama dalam mencapai kemandirian.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya memperkuat pendampingan kelembagaan, khususnya dalam bentuk pelatihan berkala dan fasilitasi regulasi lokal yang mendukung kolaborasi antar aktor desa wisata.
2. Pengurus Pokdarwis dan BUMDes perlu menyusun standar operasional dan peran yang jelas, serta memperkuat komunikasi dan kerja sama lintas lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik

- kewenangan.
3. Masyarakat desa didorong untuk lebih aktif terlibat melalui forum dialog rutin, peningkatan literasi pariwisata, dan penguatan kapasitas individu dalam mendukung kegiatan wisata secara mandiri.
 4. Keberlanjutan pengelolaan dapat dicapai dengan memperkuat semangat kolektif warga, menanamkan nilai konservasi lingkungan, dan menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas wisata desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mani, S., & Trimo, L. (2021). Faktor pendorong dan penghambat pembangunan wisata edukasi pertanian di Balai Benih Hortikultura Kabupaten Garut. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(1), 973-988. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v7i1.4898>
- Darmi, T., & Harini, R. (2025). Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Abdimas Serawai*, 4(3), 162-169.
- Darsana, I. M., dkk. (2024). Penguatan Struktur Organisasi dan Pemasaran Digital dalam Optimalisasi Desa Wisata di Kabupaten Badung. *Jurnal Ilmiah Bidang Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 59-66.
- Hidayat, T., Muchtar, A. (2022). Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata Lamajang Kabupaten Bandung dan Dampaknya terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal. *Tourism Scientific Journal*, 8(1), 93-104.
- Hutasoit, B. D., dkk. (2024). Peran Kelembagaan Pelayanan dan Pengawasan Beacukai Teluk Nibung dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional Bidang Ekspor dan Impor. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(5), 2987-2996.
- Junaid, I., Dewi, W. O., Said, A., & Hanafi, H. (2022). Pengembangan desa wisata berkelanjutan: Studi kasus di Desa Paccekke, Kabupaten Barru, Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 287-301. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.287-301>
- Kisworo, J. & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional dalam Penyusunan dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus pada Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305-321.
- Marasabessy, I., Fahrudin, A., Imran, Z., & Agus, S. B. (2018). Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 2(1), 11-22.
- Paskasari, C. S., Guntoro, B., Witjaksono, R. (2020). Kapasitas Kelembagaan Pengelola Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 4(1), 12-24.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/219426/perda-kab-purbalingga-no-11-tahun-2015>
- Permadi, B., Wahid, M., & Lega, M.

- (2021). Analisis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Desa Wisata Danau Sigombak di Desa Teluk Kembang Jambu, Kabupaten Tebo. *Jurnal Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan*, 3(2), 45-58.
- Priansa, D. J., Octaviany, V., & Hanifa, F. H. (2024). PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN DESA WISATA PATENGAN, KECAMATAN RANCABALI, KABUPATEN BANDUNG. *BINA CIPTA*, 3(2), 53–62.
- Rahmad, G., Widyaningtyas, R. S. (2024). Sinergi kelembagaan kepariwisataan dalam pengelolaan Desa Wisata Ketapanrame, Kabupaten Mojokerto [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. ETD UGM.
- Rahman, R., Taufan Handika, Hailuddin, & Didy Ika Supryadi. (2024). Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Sintung Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Abdi Anjani*, 2(2), 212–215.
- Srihardjono, N. B., Restyaningrum, R. P. (2017). Reformasi Birokrasi yang Terintegrasi dalam New Public Service (NPS) Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Kuat dan Bersih. *Jurnal Reformasi*, 7(2), 69-80.
- Solihin, E. (2021). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan.
- Sulistiyono, A. (2018). *Pengaruh Kelembagaan dan Pengelolaan terhadap Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa X* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Diakses dari https://repository.uin-suska.ac.id/12295/7/7.%20BAB%200II_2018189ADN.pdf
- Sulistyo, A., Yudiandri, T. E., Annisa, R. N., & Mudiono, M. (2023). Penguatan Kelembagaan Desa Wisata melalui Kampanye Sadar Wisata 5.0 dalam Menciptakan Pariwisata Berkelanjutan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4438-4449.
- Suriani, N., & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24-36.
- Wahyuni, Mawardi, A. I., Alawi, A. M., & Nuryananda, P. F. (2024). Pengaruh Kepemimpinan dan Manajemen Kelembagaan Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Kajian Pariwisata*, 6(1), 27-38.
- Wicaksono, F., Rahmawati, A., Sudiin, & Ramadhan, N. E. H. (2023). Pembangunan Kelembagaan Rintisan Desa Wisata pada Desa Wisata Diro, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(3), 89-102.
- Widagyo, K. G., Sari, H. P. R. (2023). Kegiatan Pendampingan Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pokdarwis Desa Wisata Watesjaya. *JHR ABDIMAS*, 1(3), 1-10.
- Widiastuti, A., & Nurhayati, A. S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Nganggring Sleman. *Jurnal Ilmiah WUNY*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jwuny.v1i1.26852>
- Wikke, S. R. (2018). *Prediktor Kinerja Penyusunan Anggaran Responsif Gender: Kajian Komitmen Organisasi, Tekanan Eksternal, Dan Ketidakpastian Lingkungan*

(Tesis Magister, Universitas
Kristen Satya Wacana).
Diakses dari
<https://repository.uksw.edu/handle/123456789/6078>

Yulianti, Y., Astutik, D. & Trinugraha,

Y. H. (2023). Analisis Peran
Masyarakat dalam Pengelolaan
Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal
Pariwisata Berkelanjutan*. 5(1), 12-
25.

